

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Good Governance

2.1.1.1 Pengertian Good Governance

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu *United Nations Development Program* (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia (Yarni dan Latifah Amir 2014).

Menurut Duadji (2012) Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).

Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output,

outcome, dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat local, nasional maupun ditingkat global.

Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik good government dan clean governance merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang tepat.

Pemerintah daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah pada skateholder. Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban tersebut haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawabn pemerintah daerah, maka laporan keuangan daerah juga harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku editor eksternal (Adisetiawan, 2013).

Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Good Governane

Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di pertanggungjawabkan efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip good governance juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta. 2012).

Menurut Lembaga Adminitrasi Negara (LAN, 2003:7) terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam

rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah,, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Good governance yang diuraikan di atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggaran pemerintah kepada rakyat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah merupakan pondasi utama bagi terciptanya good governance yang merupakan persyaratan mutlak dalam demokrasi dan ekonomi yang sesungguhnya.

2.1.2 Audit Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Audit Kinerja

Menurut Bastian (2016) audit kinerja adalah pemeriksaan objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau progam kegiatan pemerintah yang diaudit. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 mengatakan bahwa audit kinerja adalah aduit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efesiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Dengan audit kinerja, tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab akan meningkat, sehingga mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Ketikan audit kinerja merangkul pertanyaan yang lebih luas dari

keterampilan kinerja, professional akuntansi dan audit harus dilengkapi dengan keterampilan professional lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Jones dan Pendlebury (2010).

2.1.2.2 Standar Pelaksanaan Audit Kinerja

Menurut I Gusti Agung Rai (2008), terdapat empat pernyataan yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi:

1. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai
2. Staf harus disupervisi dengan baik.
3. Bukti yang cukup, komponen, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.
4. Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemerksaan.

2.1.2.3 Struktur Audit Kinerja

Sebelum melakukan audit, auditor terlebih dahulu harus memperoleh informasi umum organisasi guna mendapatkan pemahaman yang memadai tentang lingkungan organisasi yang diaudit, struktur organisasi, misi organisasi, proses kerja serta sistem informasi dan pelaporan. Pemahaman lingkungan masing-masing organisasi akan memberikan dasar untuk memperoleh penjelasan dan analisis yang lebih mendalam mengenai ksistem pengendalian manajemen.

Struktur audit kinerja terdiri atas beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pengenalan, dengan dilakukan survey pendahuluan dan review sistem pengendalian. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Tahap pengauditan, dimana audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu a) telaah hasil-hasil program, b) telaah ekonomi dan efisiensi, c) telaah kepatuhan. Tahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja..
3. Tahap pelaporan, merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya public. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislative, dan masyarakat luas. Penyampaian hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislative maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK). SAP ditetapkan dengan PP no. 24 tahun 2004 dan SAP sudah harus diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2005. Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah (Jamanson Sinaga, 2005). Indonesia merupakan salah satu negara yang akan menggunakan accrual basis accounting dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), (KSAP, draf SAP, 2008).

DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran dimana bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah sebagai agent dan DPRD sebagai principal. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agent atau pemerintah daerah (Yuhertiana, 2013). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran.

Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Laporan Keuangan.

Dalam PP no. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.1.3.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Bachtiar Arif, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan pada umumnya adalah sama yaitu:

1. Akuntabilitas. Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi.
2. Manajerial. Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.
3. Pengawasan . Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional.

2.1.3.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Menurut SAP

Menurut PP no. 71 tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumberdaya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menila kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan dalam PP No. 71 Tahun 2010 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran

arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

2.1.4 Akuntabilitas Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas (Arja Sadjarto, 2000).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa adanya pemberitahuan dari pemerintah kepada rakyat mengenai informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Hopwood dan Tomkins (1984) dan Edwood (1993), Mahmudi, (2005: 10), dan Syahrudin Rasul (2003), mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-

lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Pemerintah daerah melaksanakan amanah dari masyarakat dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawabannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tamosi, 1999). Salah satu akuntabilitas yang penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002, 21).

Tahap-tahap dalam Akuntabilitas keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001 dalam Malik Imron, 2005). Dengan kata lain akuntabilitas terkandung kewajiban menyajikan dan melaporkan

pengelolaan keuangan daerah kedalam laporan keuangan daerah. Laporan keuangan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36).

2.1.4.2 Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Kepatuhan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaansumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi). Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan daar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

2.2 Penelitian Terdahulu

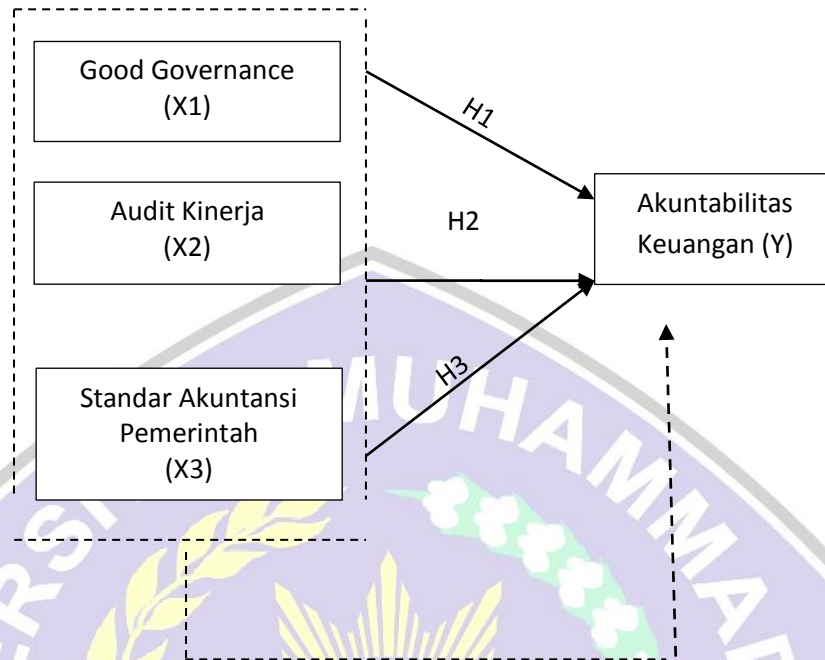
Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.2

Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ni Mde, dkk (2015)	Pengaruh audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan akseibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.	Kuantitatif	Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik yang tercermin dalam laporan keuangannya, begitu juga dengan variabel independen penyajian laporan keuangan dan akseibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
Riris Setiawati (2016)	Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah.	Kuantitatif	Pemerintah daerah kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap. Kendala dalam implementasi PP No. 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual.
Ni Putu, dkk	Pengaruh	Kuantitatif	Pemahaman standar

(2016)	pemahaman standart akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan		akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Ni Made Suratmi, dkk (2015)	Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik	Kuantitatif	Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah mengalami perkembangan yang sangat cepat berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi firkal.
Robi Maulana, (2016)	Pengaruh Standart Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka	Kuantitatif	Yerjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya, timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 1.1

Keterangan : —————> Pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y
-----> Pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

Pada bagian pertama menjelaskan tentang hubungan antara Good Governance dan akuntabilitas keuangan, pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Good Governance memiliki tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Pada bagian kedua menjelaskan tentang hubungan audit kinerja dan akuntabilitas keuangan. Audit kinerja mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaian hasil dan efektivitas program, ekonomi dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas.

Pada bagian ketiga menjelaskan hubungan antara standart akuntansi pemerintah dan akuntabilitas keuangan. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum (Bastian, 2010).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang didasarkan atas teori atau kajian teori yang masih harus diuji kebenarannya karena tidak berdasarkan fakta. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data empiris dan penelitian ilmiah yang telah ada. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Good governance terhadap Akuntabilitas keuangan

Penerapan Good Governance, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang didasarkan pada prinsip transparansi,

bertanggungjawab, partisipasi, keadilan, kemandirian, mudah dipahami dan sebenarnya (Cadbury, 1992 dalam Elvira Zeyn, 2011).

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Azlim dkk, 2012).

Pendapat ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan penerapan good governance.

Ha1 : Good Governance berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Ho1 : Good Governance tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan

2. Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Pemandagri No. 23 Tahun 2007, tahapan audit terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut audit. Pada praktiknya, semua langkah yang ditempuh dari mulai tahap perencanaan sampai tindak lanjut harus dilakukan auditor selama melakukan pemeriksaan agar menghasilkan temuan dan rekomendasi yang tepat sehingga dapat dengan optimal meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Auditor dapat meningkatkan pelaksanaan audit dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Hal yang lebih penting yaitu pengkomunikasian temuan dan rekomendasi Kepala Dinas juga harus ditingkatkan dalam membimbing pelaksanaan rekomendasi di Dinas Pemerintah Kota.

Hubungan dilakukannya audit kinerja terutama dibagian yang langsung terkait dengan pengelolaan laporan keuangan dengan kualitas pelaporan dari laporan keuangan daerah akan sangat besar. Pengaruh tersebut terkait dengan audit kinerja yang menitikberatkan kepada pemeriksaan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian yang menggambarkan kinerja dari pegawai yang terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mulai dari penganggaran, penggunaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dari pemerintah atas dana masyarakat yang dikelolanya.

Pengaruh audit kinerja dibuktikan oleh hasil peneliti Ni Made dkk (2014) dan Chandra (2013) yaitu audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Ha2: Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Ho2: Audit Kinerja tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Keuangan

3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mengelola laporan keuangan daerah dengan baik, bagus, maksimal dan mencapai target yang diinginkan. Karena komitmen organisasi sangatlah penting untuk pengelolaan keuangan daerah.

Standar akuntansi pemerintah sebagai dasar atau pedoman dari penyusunan laporan keuangan pada pemerintah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan karena standart yang harus dipenuhi oleh sebuah laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan.

Pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah dibuktikan oleh hasil penelitian Elvira Zeyn (2011), Azlim dkk (2012), dan Wiraputea dkk (2013) yaitu standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Ha3: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan.

Ho3; Standart Akuntansi Pemerintah tidsk berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan

4. Pengaruh Good governance, Audit kinerja, standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan

Dalam konteks sistem akuntabilitas keuangan, good governance, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah, efektivitas pengendalian internal dan komitmen organisasi itu memiliki keterkaitan. Artinya suatu anggaran itu harus dilaporkan dan pelaporan itu harus dalam bentuk yang baik, laporan yang baik tidak akan terbentuk jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu hal yang juga harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengandung kejujuran artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggung jawaban pemerintah yang mengelola dana masyarakat.

(Wiraputra 2014) yang memperoleh penelitian bahwa good governance, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan.

Ha4: pengaruh good governance, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Ho4; pengaruh good governance, audit kinerja, standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.